



Terjebak Biaya Lisensi? Gotong-royong Jawabannya

Saat ini, dengan mulai ditegakkannya UU HaKI, banyak orang mulai panik kebakaran jenggot karena mereka sudah terlanjur terbiasa menggunakan aplikasi komersial yang selama ini diperoleh dengan cara *membajak*. Sayangnya, banyak orang beranggapan bahwa permasalahan yang dihadapinya hanyalah akibat produk Microsoft yang digunakannya saja. Hal ini disebabkan karena pihak Microsoft-lah yang belakangan ini gencar melakukan sosialisasi masalah HAKI. Sebagai dampaknya anggapan ini, banyak lembaga pendidikan tinggi beranggapan bahwa dengan membayar dan bergabung dengan *Microsoft Campus Agreement* (MCA) maka persoalannya beres.

Mereka lupa atau sengaja melupakan dengan kenyataan bahwa banyak program non-Microsoft yang telah terbiasa digunakan selama ini, misal AutoCAD, Photoshop, SPSS, ArcInfo, MapInfo, MathLab, Corel Draw, Delphi for Windows, dan sebagainya. Hal ini pernah saya pertanyakan kepada rekan dari perguruan tinggi yang memilih jalur membayar lisensi *proprietary* untuk universitasnya, sayangnya hingga saat ini saya tak memperoleh jawaban dari mereka. Tawaran harga murah, untuk produk Microsoft, bagi lembaga pendidikan belumlah memecahkan masalah. Lembaga pendidikan perlu melihat lebih luas lagi permasalahan lisensi ini.

Sayang sekali, bila pihak lembaga pendidikan dan dosen malah melanggarkan kesalah-kaprahan ini. Saat ini sudah mulai ada kesadaran mahasiswa untuk mulai tidak menggunakan program bajakan, dengan cara menghindari penggunaan program komersial yang mahal. Sayangnya masih banyak pengajar yang secara tidak sadar 'memaksa anak didiknya' menjadi pembajak, dengan meminta mereka mengerjakan tugas dengan menggunakan program bajakan (misal harap kumpulkan dengan program A, padahal jelas-jelas program A ini adalah program komersial yang tidak mampu dibayar oleh si mahasiswa).

Salah satu alasan dari para pengajar atau lembaga pendidikan tinggi tentang enggan menggunakan program alternatif, misal **RStat** (<http://www.r-project.org/>) untuk statistik, **SciLab** (<http://www-rocq.inria.fr/scilab/>) untuk pengganti MathLab, atau

GRASS (<http://grass.itc.it/>) untuk GIS adalah kurangnya fitur. Misal, alasan OpenOffice kurang cepat, Rstat dan SciLab kurang fitur ini dan itu, sering dikemukakan. Atau belum umumnya program ini sehingga sulit mencari buku untuk mempelajarinya. Tentu saja timbul pertanyaan, bila mereka mengetahui adanya kekurangan fitur misal kurang cepat, mengapa mereka tidak mencoba menginvestasi waktu dan biaya untuk membantu pengembangan aplikasi tersebut sehingga bisa sesuai kebutuhannya? Jawaban dari pertanyaan itu adalah jawaban klasik, yaitu tidak adanya dana untuk membayar tenaga pengembang untuk melakukan hal tersebut. Mencari pengembang yang suka rela adalah hal yang sulit pada zaman ini di Indonesia.

Mungkin bagi institusi atau universitas yang memiliki cukup dana, mengeluarkan sejumlah dana untuk membayar lisensi tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi bila kita pertimbangkan dalam lingkup nasional, bila kita jumlah universitas dan lembaga pendidikan, maka dana yang harus dikeluarkan untuk membeli perangkat lunak ini menjadi tinggi sekali. Apalagi program seperti SPSS, MathLab, ArcInfo, AutoCAD, PhotoShop tidaklah berharga murah, minimal berharga ratusan US\$.

Saat ini Microsoft menawarkan harga sangat murah, sekitar US\$2,5 untuk MS Windows beserta MS Office kepada setiap komputer di lingkungan sekolah di Indonesia, baik dari sekolah dasar hingga menengah. Bila satu sekolah memiliki sekitar 20 komputer, dan bila di Indonesia terdapat lebih dari 1000 sekolah yang tertarik dengan program ini, maka dana yang akan dikeluarkan adalah sekitar 20x1000x US\$2,5 atau sekitar US\$50.000.

Bagaimana dengan biaya lisensi *software* lainnya? Maka bisa diperkirakan lebih dari US\$50.000 akan terbuang untuk membeli software, dan ini baru pada tahun pertama. Ketika terjadi *upgrade* software, akan dibutuhkan biaya tambahan lainnya. Belum lagi dengan pertimbangan pendekatan *platform* ini, maka untuk aplikasi lainnya akan ada kecenderungan menggunakan aplikasi di platform itu yang telah biasa digunakan dan membutuhkan biaya lisensi pula. 

Lembaga pendidikan perlu melihat lebih luas lagi permasalahan lisensi ini.

Bagian 1 dari 2 Tulisan



Terjebak Biaya Lisensi? Gotong-royong Jawabannya

Untuk menghindari biaya lisensi yang tinggi, perlu dicari suatu solusi selain meminta potongan harga. Ini sekaligus dapat melakukan terobosan untuk permasalahan pembajakan peranti lunak dan kebutuhan peranti lunak.

Universitas, lembaga, atau perusahaan yang semula berkeinginan membeli peranti lunak atau menyisihkan dananya untuk lisensi khusus peranti lunak, dapat mengumpulkan dana tersebut untuk kepentingan pengembangan aplikasi *open source*. Tentu saja dana ini harus dikelola oleh suatu organisasi secara terbuka. Bila enggan dapat juga institusi tersebut memberikan dananya secara langsung kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya dengan membentuk tim programmer yang tentu saja yang terdiri dari para programmer yang berpengalaman dan diberi honor per bulan yang memadai untuk pekerjaan pemrograman. Sehingga mereka tak perlu memikirkan 'dapur ngebul'. Pekerjaan programmer tersebut adalah turut serta dalam pengembangan program *open source* yang akan banyak digunakan, misal OpenOffice, KOffice, Rstat, SciLab, GIMP, dan sebagainya.

Dana ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan lokal seperti sistem pengelolaan perpustakaan atau sistem pengelolaan sekolah, aplikasi perkantoran (otomasi surat-menyurat), penerjemahan program *open source*, ataupun pembuatan program kamus Indonesia-Inggris, pengembangan *spelling checker*, *thesaurus* bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Dana ini bisa juga untuk kegiatan yang memudahkan pemanfaatan program *open source* secara luas. Misalnya pembuatan modul pelatihan dan buku panduan untuk melakukan migrasi, pembuatan *knowledge based*, perangkat video pengajaran program *open source*, dan lain-lain. Hasil dari pengembangan itu diberikan bebas kepada masyarakat luas, sehingga pengguna yang akan memilih aplikasi alternatif mendapatkan kemudahan.

Dana ini dapat ditawarkan melalui mekanisme seperti 'lelang' ataupun ala RUT (Riset Unggulan Terpadu). Jadi ada suatu organisasi yang menangani dana ini (tentu saja untuk masalah keorganisasiannya harus dibicarakan lebih lanjut lagi). Tapi satu hal yang penting dicamkan bahwa pemanfaatan dana ini haruslah berupa hasil yang dapat dinikmati oleh semua pengguna, dan tersedia secara *open source*. Tanpa organisasi dapat juga dilakukan

pendanaan secara langsung kepada pihak (*person*) yang memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan peranti lunak *open source* tersebut, agar mereka lebih dapat melakukan kontribusinya secara lebih banyak. Dengan cara ini diharapkan pengembangan program *open source* itu dapat diakselerasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan. Cara seperti ini banyak dilakukan oleh perusahaan *distro* seperti SuSE, Red Hat, Mandrake, Connectiva, dan sebagainya. Pemerintah Jerman juga melakukannya dengan membantu pengembangan proyek **Kroupware** [www.kroupware.org].

Pemerintah Indonesia sebetulnya dalam skala tertentu sudah memulai dengan WinBI dan Kantaya (yang akhirnya mendorong pihak Microsoft untuk merilis MS Windows dan MS Office berbahasa Indonesia). Yang belum ada atau masih sedikit sekali, adalah bantuan dana dari pihak perusahaan (misal dari perusahaan penyedia layanan *open source*) dan dari lembaga pendidikan untuk membantu pengembangan *open source*. Misal, perusahaan yang menggaji programernya untuk mengembangkan program *open source*.

**Tetapi yang mengganjal,
belum ada kontribusi
balik dari mereka...**

Linux sudah mulai makin banyak digunakan perusahaan. Penyedia layanan Linux juga mulai banyak. Tapi ada yang satu yang mengganjal, yaitu kontribusi balik dari mereka yang selama ini telah menikmati hasilnya (terutama hasil berupa materi). Hal ini bukan sebagai suatu usaha 'menagih'

balas budi, tapi sebaiknya dipikirkan dalam kerangka pengembangan *open source*. Dengan cara ini pengembangan aplikasi bisa diakselerasi, sehingga lebih cepat memperoleh manfaat, atau memperoleh peranti lunak itu seperti yang kita butuhkan. Kontribusi itu dapat berupa bantuan tenaga pemrogram, bantuan dana untuk mendukung pemrogram, bantuan laporan *bug*, dan lain sebagainya. Sebetulnya dengan membantu para pengembang *open source*, perusahaan pengguna peranti lunak *open source* ataupun perusahaan penyedia jasa *open source* akan lebih cepat mengambil manfaat ketimbang bila mereka tidak melakukan sumbangan.

Tentu saja yang jadi pertanyaan bagi kita semua, masih adakah semangat gotong-royong di dalam diri kita? Sehingga kita rela menyumbangkan dana tapi bukan eksklusif kita saja yang menikmati hasilnya? Atau memang kata gotong-royong sudah tidak ada tempatnya lagi di komunitas kita? Salam MDGR (Masyarakat Digital Gotong Royong)! 🙏

Bagian 2 dari 2 Tulisan